

# BAB V

## ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan *trend* pencapaian pendapatan daerah dan kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional Kabupaten Bandung Barat serta kapasitas dinas penghasil Kabupaten Bandung Barat, maka diperkirakan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan di bawah 10 %. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan, upaya-upaya penggalian potensi pendapatan daerah termasuk didalamnya pendayagunaan aset Kabupaten Bandung Barat masih belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal.

### 5.1 Arah Kebijakan Keuangan

#### 5.1.1 Prinsip Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dalam setiap periode anggaran meliputi tiga siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menempuh ketiga siklus tersebut akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Pada tahap perencanaan** : digunakan input yang berawal dari aspirasi masyarakat melalui penjangkaran dalam musrenbang, yang dimulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan, dan berakhir di tingkat kabupaten. Dalam setiap tingkatan musrenbang diikutsertakan seluruh *stakeholder* yang ada dengan pendekatan partisipatif. Hasilnya merupakan usulan yang akan diajukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang diusulkan mencerminkan penjabaran tahunan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.  
  
Sesuai dengan amanat undang-undang, anggaran disusun dengan pendekatan kinerja, berarti anggaran harus berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (anggaran pro-publik). APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat (transparansi), pajak daerah, retribusi daerah, dan semua pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar (keadilan).
2. **Pada tahap pelaksanaan** : anggaran harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin RKA-SKPD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD merupakan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah setiap tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening umum kas daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel, akan disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. **Pada tahap pertanggungjawaban** : sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tentang keuangan daerah pertanggungjawaban terdiri dari :
  - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah
  - b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) .
  - c. Laporan Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat.

### 5.1.2 Arah Kebijakan Anggaran

Arah kebijakan anggaran Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan berupa pemenuhan pendanaan untuk pencapaian rencana jangka menengah. Sebagai daerah otonomi baru, dalam tahun-tahun awal masih akan terjadi defisit anggaran, sehubungan dengan dibutuhkannya dana yang cukup besar untuk

pengadaan infrastruktur pemerintahan. Peningkatan PAD tidak akan mencukupi, maka jalan keluar untuk menutupi defisit tadi selain dengan meningkatkan penerimaan dana perimbangan dan bantuan keuangan/hibah dari pemerintah pusat serta kebijakan pembiayaan, juga dengan cara menjalin kemitraan, baik dengan sumber dalam negeri maupun dari luar negeri.

Apabila rencana tersebut dapat berjalan dengan baik maka direncanakan diakhir tahun anggaran ke-5 tahap I Rencana Jangka Panjang Daerah akan terjadi surplus anggaran. Arah kebijakan anggaran meliputi :

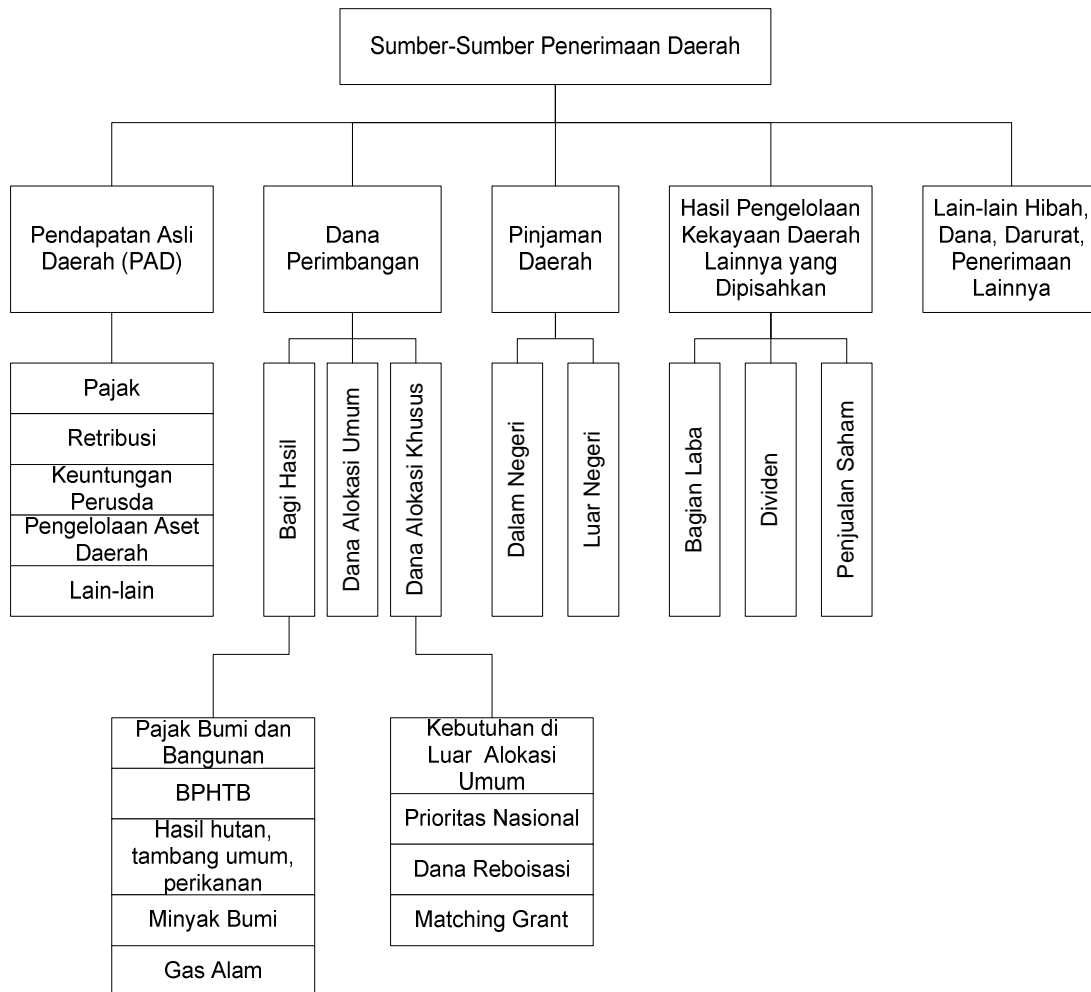
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

## 5.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuivalen dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Merujuk kepada UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (lihat Gambar 5.1), struktur pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah ;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Dana Perimbangan terdiri dari :
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Alokasi khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi :
  - a. Hibah

- b. Dana Darurat;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan daerah lainnya;
- d. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus; dan
- e. Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya.



Gambar 5.1. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Sumber : UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah

## 5.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ketika wilayah Kabupaten Bandung Barat masih menjadi bagian dari Kabupaten Bandung (2007) dan APBD tahun pertama (2008) dapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1. Jenis pendapatan asli daerah Tahun 2007 dan 2008

NO.	JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH	2007	2008
1	Pajak Daerah	13.574.659.000	18.322.050.000
1.1.	Pajak Hotel	886.400.000	1.925.000.000
1.2.	Pajak Restoran	949.200.000	1.575.000.000
1.3	Pajak Hiburan	447.646.000	375.000.000
1.4.	Pajak Reklame	538.686.000	842.300.000
1.5.	Pajak Penerangan Jalan	10.000.000.000	13.000.000.000
1.6.	Pajak Galian Gol. C	752.727.000	600.000.000
1.7.	Pajak Parkir	-	4.750.000
2	Retribusi Daerah	1.855.892.000	9.195.108.550
2.1.	Retribusi Layanan Kesehatan		2.000.000.000
2.2.	Retribusi Persampahan		420.925.000
2.3.	Retribusi Kekayaan Daerah (Pemanfaatan Tanah/DAMIJA)		3.940.950
2.4.	Retribusi IMB		1.107.335.282
2.5.	Retribusi Ijin Reklame		201.641.850
2.6.	Retribusi Parkir di Jalan Umum		160.000.000
2.7.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		499.991.500
2.8.	Retribusi Terminal		249.912.000
2.9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		184.500.000
2.10	Retribusi Perijinan tertentu (Dishub)		318.264.000
2.11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair		103.750.000
2.12	Retribusi Ijin Tetap Pertambangan		28.000.000
2.13	Retribusi Ijin Air bawah Tanah		47.948.000
2.14	Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan		297.025.000
2.16	Retribusi Ijin Gangguan dan Keramaian (HO)		125.000.000
2.17	Retribusi Ijin Pemanfaatan Tanah (Tapra)		800.000.000
2.18	Retribusi Ijin Usaha Kontruksi		2.000.000
2.19	Retribusi pada Dinas Pertanian/Perikanan/Peternakan		187.000.000
2.20	Retribusi Pelayanan Pasar		1.288.880.000
2.21	Retribusi Pengelolaan Pasar		62.825.000
2.22	Retribusi Perijinan Perdagangan		71.700.000
2.23	Retribusi Perijinan Perindustrian		27.500.000
2.24	Retribusi dari Kecamatan-kecamatan		1.150.813.050

2.25	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran		8.017.500
2.26	Retribusi Pelayanan Pemakaman / Pengabuan Mayat		1.504.250
3	Hasil Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		300.000.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		1.839.090.000
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>15.430.551.000</b>	<b>29.809.613.382</b>

Sumber : Tahun 2007 Hasil Analisa BAKD Kab.Bandung (setelah direvisi pendapatan dari PJU) dan Tahun 2008 Perda Perubahan APBD Tahun 2008

### 5.2.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pos PAD yang paling dominan adalah Pos Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp 13.000.000.000 (44 %) dari total PAD.

Seluruh jenis pajak mempunyai potensi untuk ditingkatkan besaran penerimaannya, ada kondisi yang saling mempengaruhi antara keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan peningkatan penerimaan PAD dari sektor pajak daerah. Tabel 5.2 berikut memperlihatkan kebijakan yang harus dilakukan untuk peningkatan tiap jenis pajak daerah.

Tabel 5.2. Kebijakan yang harus dilakukan untuk setiap jenis pajak daerah dan SKPD terkait.

NO.	JENIS PAJAK DAERAH	KEBIJAKAN	SKPD
1	Pajak Hotel dan Pajak Restoran	KBB harus menjadi tujuan akhir wisatawan, dengan menambah lokasi tujuan selain Lembang, seperti Pinggiran Waduk Saguling dan Cirata	
2	Pajak Hiburan	Peningkatan kualitas dari objek-objek wisata yang dapat dipungut pajaknya, seperti Maribaya, Curug Cimahi, Curug Panganten, Situ Ciburuy, Gunung Tangkuban Parahu, direncanakan akan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta.	
4	Pajak Reklame	Intensifikasi pemungutan sehingga tidak ada lagi papan-papan reklame liar dan ekstensifikasi titik papan reklame pada daerah yang sudah ditentukan.	
5	Pajak Penerangan Jalan	PPJU yang paling besar berasal dari pemakai listrik industri, maka PPJU akan naik seiring dengan meningkatnya jumlah investor dibidang industri manufaktur, sehingga Maka harus ada kebijakan yang akan bisa meingkatkan investasi.	
6	Pajak Galian Gol. C	Sesuai dengan Visi, misi KBB maka pungutan pajak Galian Gol C harus lebih mengarah pada pengendalian kelestarian lingkungan hidup, namun khusus untuk Galian Gol C yang sudah berjalan harus dilakukan penerbitan perijinannya sehingga bisa didorong peningkatan pajaknya.	
7	Pajak Parkir	Harus dilakukan intensifikasi untuk lokasi-lokasi parkir yang belum terpungut seperti area hotel, restoran, tempat rekreasi, dan swalayan.	

Sumber : Tahun 2007 Hasil Analisa BAKD Kab.Bandung (setelah direvisi pendapatan dari PJU) dan Tahun 2008 Perda Perubahan APBD Tahun 2008

Perkembangan penerimaan pajak daerah dari 2009 sampai dengan 2014 apabila kebijakan-kebijakan tersebut di atas dapat dilaksanakan, prediksi penerimaan pajak daerah sampai tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Target Penerimaan Pajak Daerah 2009 – 2014 (dalam ribuan)

NO.	JENIS PAJAK DAERAH	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pajak Hotel	2.543.950	2.722.027	2.912.569	3.116.449	3.334.600	3.568.022
2	Pajak Restoran	2.312.538	2.474.416	2.647.625	2.832.959	3.031.266	3.243.455
3	Pajak Hiburan	150.000	160.500	171.735	183.757	196.620	210.383
4	Pajak Reklame	1.163.514	1.244.960	1.332.108	1.425.355	1.525.130	1.631.889
5	Pajak Penerangan Jalan	15.015.545	16.066.634	17.191.298	18.394.689	19.682.317	21.060.079
6	Pajak Galian Gol. C	650.000	695.500	744.185	796.278	852.018	911.659
7	Pajak Parkir	10.000	10.700	11.449	12.251	13.108	14.026
Sub Total		21.845.547	23.374.737	25.010.969	26.761.738	28.635.059	30.639.513

Sumber : Hasil Analisa BPPKAD Kab.Bandung Barat, 2009.

### 5.2.1.2 Retribusi Daerah

Pada umumnya Retribusi daerah lebih dianggap sebagai alat pengendalian, peningkatan pelayanan, dan pengawasan dibandingkan sebagai sumber penerimaan. Jenis retribusi daerah yang mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan adalah retribusi parkir di tepi jalan umum, IMB, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi persampahan. Sedangkan retribusi pelayanan kesehatan walaupun jumlahnya cukup besar tetapi semuanya dikembalikan untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Target penerimaan dari Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 5.4

Tabel 5.4. Target Penerimaan Retribusi Tahun 2009-2014 (dalam ribuan)

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Retribusi Layanan Kesehatan	2.000.000	2.140.000	2.289.800	2.450.086	2.621.593	2.805.104
2	Retribusi Persampahan	484.000	517.880	554.132	592.921	634.426	678.836
3	Retribusi Kekayaan Daerah	72.508	77.584	83.015	88.826	94.426	100.000
4	Retribusi Pemanfaatan Tanah/DAMIJA	6.000	6.600	7.260	7.986	8.785	9.664
5	Retribusi IMB	1.221.000	1.306.470	1.397.923	1.495.778	1.907.884	2.041.436
6	Retribusi Ijin Reklame	247.500	272.250	299.475	329.423	362.365	398.602
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	550.677	589.224	630.470	674.603	721.825	772.353
8	Retribusi Terminal	274.896	294.139	314.729	336.760	360.333	385.556
9	Retribusi Parkir Tepi Jalan	176.000	188.320	201.503	215.608	257.682	283.450
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	193.725	207.286	221.796	237.322	253.934	271.710
11	Retribusi Ijin Trayek	51.500	55.105	58.963	63.090	67.506	72.232
12	Retribusi Ijin Bongkar Muat	88.000	94.160	100.752	107.804	115.351	123.425
13	Retribusi Ijin Pengusahaan Angkutan	43.735	46.797	50.073	53.578	57.328	61.341
14	Retribusi Ijin Angkutan Karyawan	1.125	1.204	1.289	1.379	1.475	1.578
15	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	109.000	116.630	124.795	133.530	142.877	152.879
16	Retribusi Ijin Tetap Pertambangan	27.000	28.890	30.913	33.077	35.392	37.869
17	Retribusi Ijin Air Bawah Tanah	41.000	43.870	46.941	50.227	53.743	57.505
18	Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan	21.450	22.952	24.559	26.278	28.117	30.085
19	Retribusi Ijin Gangguan dan Keramaian (HO)	224.093	239.779	256.564	274.523	293.740	314.301
20	Retribusi Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)	45.000	48.150	51.521	55.127	58.986	63.115
21	Retribusi Ijin Usaha Kontruksi	2.000	2.140	2.290	2.451	2.622	2.806
22	Retribusi Jasa Rumah Potong Hewan	54.800	58.636	62.741	67.133	71.832	76.860
23	Retribusi Pelayanan Pasar	1.397.067	1.494.862	1.599.503	1.711.468	1.831.270	1.959.459
24	Retribusi Pengelolaan Pasar	67.878	72.629	77.713	83.153	88.974	95.202
25	Retribusi Perijinan Perdagangan	82.609	88.392	94.579	101.200	108.284	115.864
26	Retribusi Perijinan Perindustrian	31.500	33.705	36.065	38.589	41.291	44.181

27	Retribusi dari Kecamatan-kecamatan	1.011.861	1.082.692	1.158.480	1.239.573	1.326.344	1.419.188
28	Retribusi Penggantian Akte Catatan Sipil	291.480	311.884	333.716	357.076	382.071	408.816
29	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	195.200	208.864	223.485	239.129	246.436	261.222
30	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	8.600	8.858	9.124	9.398	9.680	9.970
31	Retribusi Pelayanan Pemakaman / Pengabuan Mayat	1.650	1.766	1.890	2.022	1.858	1.913
32	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	53.197	56.920	60.905	65.168	69.730	74.611
<b>TOTAL RETRIBUSI DAERAH</b>		<b>9.076.051</b>	<b>9.718.638</b>	<b>10.406.949</b>	<b>11.144.286</b>	<b>12.798.160</b>	<b>13.709.969</b>

Sumber : Hasil Analisa BPPKAD Kab.Bandung Barat, 2009.

**Retribusi parkir** di tepi jalan umum dapat ditingkatkan selain dengan cara intensifikasi yaitu menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi yang sesungguhnya, juga dengan menciptakan sentra-sentra parkir baru dengan membuat titik-titik keramaian baru.

**Retribusi IMB**, khusus untuk daerah KBB bagian Utara pengenaan retribusi IMB harus dititik beratkan sebagai alat pengendalian, agar KBB bagian Utara sebagai kawasan konservasi tidak terganggu. Penerimaan IMB dapat ditingkatkan dengan melakukan intensifikasi, terutama untuk bangunan-bangunan permanen tidak berijin di daerah perkotaan.

**Retribusi Pelayanan Pasar** dapat ditingkatkan dengan (a) melakukan pembenahan terhadap pedagang kaki lima yang retribusinya tidak terpungut dengan baik; (b) memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap para pedagang yang patuh terhadap kewajibannya; dan (c) melakukan perluasan pungutan, baik dengan membangun pasar-pasar baru maupun perluasan objek pajak, misalnya adanya retribusi atas pasar-pasar swalayan.

**Retribusi Persampahan**, bisa dimaksimalkan dengan melihat letak geografis Kabupaten Bandung Barat sangat ideal untuk lokasi TPA bagi beberapa kabupaten/kota.

### 5.2.1.3 Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan dari Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2008 hanya bersumber pada pembagian deviden PDAM dari Kabupaten Induk sebesar Rp 300.000.000,- per tahun, sumber lain pada pos ini adalah dari pembagian deviden atas penanaman modal pada Bank Jabar yang bisa mencapai lebih dari Rp 5.000.000.000,-.

Penambahan PAD yang signifikan akan dilakukan melalui pendirian BUMD, untuk itu perlu dilakukan studi kelayakan untuk pendirian BUMD yang sesuai dengan potensi daerah dengan pendanaan secara kemitraan dengan swasta atau dengan menjual obligasi



daerah. Penerimaan penghasilan dari BUMD ini akan meningkatkan persentase PAD pada akhir periode RPJMD.

#### 5.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah lainnya yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terutama diperoleh dari jasa giro/deposito, untuk mendapatkan hasil yang optimal akan dilakukan *cash management* sehingga pendapatan dari dana yang disimpan pada bank yang menjadi Kas Daerah menjadi lebih besar tanpa menimbulkan efek negatif terhadap likuiditas dana operasional.

Peningkatan penerimaan dari sektor ini akan seiring dengan adanya peningkatan pendapatan, baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan, maupun penerimaan dana lainnya.

### 5.3 Dana Perimbangan

#### 5.3.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak

Penerimaan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang dapat dilihat keseluruhannya pada Tabel 5.5 dan Tabel 5.6. Jumlah Dana Bagi Hasil tahun 2008 lebih banyak daripada 2007 dengan penambahan di seluruh jenis pos. Pos PBB merupakan sumber terbesar Dana Bagi Hasil.

Tabel 5.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2007-2009

NO.	JENIS BAGI HASIL	2007	2008	2009
1	PBB	12.766.202.000	21.250.000.000	25.000.000.000
2	BPHTB	4.781.005.000	13.750.000.000	14.000.000.000
3	PPh pasal 25/29 WP Pribadi/PSL 21	3.000.000.000	10.449.474.000	11.585.920.000
4	Provinsi SDA	100.000.000	1.424.133.000	1.424.133.000
5	Iuran Eksplorasi & Eksploitasi	91.971.000	256.454.000	352.004.000
6	Pungutan Perikanan	86.000.000	350.110.000	248.448.000
7	Pertambangan Minyak Bumi	2.425.000.000	6.660.304.000	3.290.783.000
8	Pertambangan Gas Bumi	996.730.000	927.865.000	516.847.000
9	Pertambangan Panas Bumi	-	-	4.096.412.000
Jumlah		24.246.908.000	55.068.340.000	60.514.547.000

Keterangan :

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan : Jumlah penerimaan dari pos ini dapat ditingkatkan sampai dengan minimal 10 % per tahun, dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

BPHTB : meningkatkan penerimaan dengan cara kontrol yang ketat pada saat transaksi. Bekerjasama dengan PPAT.

Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 dan PPh pasal 21: memberikan insentif pada para pengusaha yang mempunyai usaha di Kabupaten Bandung Barat bersedia mempunyai NPWP di KPP Cimahi sehingga PPh pribadinya masuk sebagai penerimaan KBB. Bagi wajib pajak Pasal 21 yaitu para karyawan agar dihitung, dilaporkan dan dibayar berdasarkan ajas lokasi (sesuai dengan ketentuan perpajakan) harus ada kerjasama dengan KPP Cimahi.

Tabel 5.6. Proyeksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2009-2014 (dalam ribuan)

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	PBB	25.000.000	26.750.000	28.622.500	30.626.075	32.769.901	35.063.794
2	BPHTB	14.000.000	14.980.000	16.028.600	17.150.602	18.351.145	19.635.725
3	PPh pasal 25/29 WP Pribadi/PSL 21	11.585.920	12.396.935	13.264.720	14.193.251	15.186.778	16.249.853
4	DBH dari Kehutanan	1.424.133	1.424.133	1.424.133	1.424.133	1.424.133	1.424.133
5	DBH Iuran Eksplorasi & Eksploitasi	352.004	352.004	352.004	352.004	352.004	352.004
6	DBH dari Pungutan Perikanan	248.448	248.448	248.448	248.448	248.448	248.448
7	DBH dari Pertambangan Minyak Bumi	3.290.783	3.290.783	3.290.783	3.290.783	3.290.783	3.290.783
8	DBH dari Pertambangan Gas Bumi	516.847	516.847	516.847	516.847	516.847	516.847
9	DBH dari Pertambangan Panas Bumi	4.096.412	4.096.412	4.096.412	4.096.412	4.096.412	4.096.412
<b>DANA BAGI HASIL</b>		<b>60.514.547</b>	<b>64.055.562</b>	<b>67.844.447</b>	<b>71.898.555</b>	<b>76.236.451</b>	<b>80.877.999</b>

Sumber : Hasil Analisis DPPKAD Kab. Bandung Barat, 2009

### 5.3.2 Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Penerimaan DAU pada Tahun 2008 sebesar Rp 486.211.550.000,-; pada Tahun 2009 sebesar Rp 566.578.129.000,-; sedangkan DAK pada Tahun 2008 sebesar Rp 4.274.000.000,- ; dan pada Tahun 2009 sebesar Rp 19.130.000.000,-.

Dari penerimaan DAU sebesar Rp 566.578.129.000,- dihabiskan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 445.240.000.000,- (87 %), sedangkan Kabupaten Bandung pada tahun 2007 menerima DAU sebesar Rp 1.351.912.000.000,- dengan belanja pegawai sebesar Rp 1.032.068.122.450,- (76 %). ini berarti DAU Kabupaten Bandung Barat masih terlalu rendah, maka akan diupayakan untuk tahun berikutnya Pemerintah KBB akan secara proaktif melakukan pengurusan ke departemen terkait, baik untuk DAU maupun DAK dan bantuan-bantuan lainnya. Proyeksi selengkapnya lihat Tabel 5.7.

### 5.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis pendapatan ini sangat tergantung pada penghasilan dari provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, dengan demikian pemerintah KBB bersifat menunggu. Sama dengan masalah dana perimbangan dari pusat, maka untuk mendapatkan porsi yang adil atas bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat, maka pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan lebih proaktif dalam mendapatkan besaran bantuan baik melalui eksekutif maupun melalui jalur legislatif. Pencarian Dana Bantuan juga harus dilakukan untuk menunjang belanja pengadaan pusat perkantoran pemerintahan KBB. Proyeksi selengkapnya lihat Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Tahun 2008-2013 (dalam ribuan).

TAHUN	DAU	DAK	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	JUMLAH
2008	486.211.550	4.274.000	114.805.994	605.291.544
2009	566.578.129	19.130.000	77.102.555	662.810.684
2010	606.238.599	20.469.100	82.499.734	709.207.433
2011	648.675.300	21.901.937	88.274.716	758.851.953
2012	694.082.571	23.435.073	94.453.946	811.971.590
2013	742.668.351	25.075.528	101.065.722	868.809.601
2014	794.655.136	26.830.815	108.140.322	929.626.273

Sumber : Hasil Analisis DPPKAD Kab. Bandung Barat, 2009

### 5.3.4 Penerimaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan diproyeksikan sejak tahun 2009-2014 dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8. Total penerimaan daerah proyeksi Tahun 2009-2014 (dalam ribuan).

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pendapatan Asli Daerah	35.281.598	38.209.042	41.387.194	44.838.215	49.949.876	54.698.921
2	Dana Perimbangan	662.810.684	709.207.433	758.851.953	811.971.590	868.809.601	929.626.273
3	Dana Bagi Hasil	60.514.547	64.055.562	67.844.447	71.898.555	76.236.451	80.877.999
4	Penerimaan Pembiayaan	81.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	95.000.000	96.050.000
<b>Total Penerimaan Daerah</b>		<b>839.833.345</b>	<b>891.264.629</b>	<b>947.366.952</b>	<b>1.007.397.360</b>	<b>1.088.730.926</b>	<b>1.160.758.943</b>

Sumber : Hasil Analisis DPPKAD Kab. Bandung Barat, 2009

### 5.3.5 Dana Masyarakat dan Mitra

Arah kebijakan tahun 2008-2013 untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Bandung Barat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Bandung Barat;
2. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;

4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas, seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan perikanan, industri pengolahan, dan industri manufaktur;
5. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.

Dari informasi para mitra pengusaha yang hadir dalam kelompok diskusi terfokus penyusunan RPJM, beberapa perusahaan yang berpeluang besar untuk dapat mendukung visi dan misi KBB adalah Biofarma, Sanbe, Telkom, Perhutani Bandung Selatan, Ultrajaya, Perhutani Bandung Utara, Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC), Belaputera, dan Kraft Ultrajaya.

Secara umum dari Tabel 5.9 menunjukkan bahwa program yang paling berpeluang didukung adalah peningkatan akses permodalan untuk strategi pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kualitas usaha kecil menengah dan penyadaran berkoperasi. Sementara untuk melaksanakan strategi akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa sama sekali tidak ada perusahaan yang berperan. Tentunya, peran perusahaan selama ini lebih dalam konteks CSR (*corporate social responsibility*). Kedepannya tentu diperlukan koordinasi yang lebih baik tanpa intervensi yang dapat menimbulkan disinsentif bagi perusahaan. Oleh karena itu diperlukan komunikasi terlebih dahulu untuk menjalin kesepemahaman yang seimbang.

Tabel 5.9. Dukungan perusahaan terhadap program KBB.

STRATEGI DAN PROGRAM		BIOFARMA	SANBE	TELKOM	PERHUTANI BANDUNG SELATAN	ULTRAJAYA	PERHUTANI BANDUNG UTARA	BPWC	BELAPUTERA	KRAFT ULTRAJAYA	JUMLAH
I	Strategi : Penataan SDM mencakup sumber daya aparatur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing										
8	I.C.3	Peningkatan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pengelolaan wisata alam	0	0	0	0	0	1	0	0	1
11	I.C.6	Pengadaan beasiswa pendidikan	0	1	0	0	1	0	0	1	3
47	III.B.3	Pengembangan program penghijauan	0	0	0	0	0	0	0	1	1
II	Strategi : Menjadikan Bandung Barat sebagai kabupaten agro industri										
37	II.E.3	Pengembangan Usaha/Jasa untuk peningkatan nilai tambah petani	0	0	0	1	0	1	1	0	3
41	II.F.3	Pemanfaatan lahan tidur untuk komoditas	0	1	0	0	1	0	0	0	2

		produktif.										
III	Strategi : Menjadikan Bandung Barat sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Tatar Bandung yang berwawasan lingkungan											
49	III.C.2	Pengembangan kerjasama dengan swasta	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3
50	III.C.3	Pengembangan kerjasama dengan Perhutani	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
IV	Strategi : Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kualitas usaha kecil menengah dan penyadaran berkoperasi											
60	IV.A.4	Peningkatan akses permodalan	1	0	1	1	0	1	0	1	0	5
62	IV.B.1	Peningkatan kualitas SDM	0	0	1	1	0	1	1	0	0	4
66	IV.C.2	Peningkatan akses pasar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
V	Strategi : Akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa											
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	.
	JUMLAH DUKUNGAN PROGRAM		2	2	3	3	2	3	3	3	1	25

Sumber : Hasil diskusi kelompok terfokus dengan pengusaha dan BUMD (2008).

## 5.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Arah kebijakan Belanja Daerah selama kurun waktu lima (5) tahun ke depan diselaraskan dengan arah kebijakan umum untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat seperti telah ditetapkan dalam BAB III. Pada garis besarnya arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan strategi dan program yang merupakan cerminan dari visi dan misi, seperti terurai pada Sub Bab.4.4. Sedangkan peran SKPD terkait untuk setiap strategi dan program dapat dilihat pada Sub Bab 4.6.

Beberapa pedoman umum dalam belanja daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Bandung Barat, yaitu :

1. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja. Pengeluaran belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas, dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pengalokasian anggaran belanja yang

direncanakan oleh SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Terselenggaranya pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis harus ditunjang dengan tersedianya sarana, prasarana perkantoran yang memadai, maka mulai tahun anggaran 2009 disediakan anggaran untuk pengadaan pusat perkantoran pemerintahan, yang dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan selesai pada tahun anggaran 2012. Pada tahun 2009 telah dianggarkan anggaran sebesar 50 milyar untuk pengadaan tanah, selain itu pendekatan *turn key project* akan menjadi salah satu strategi untuk ketersediaan perkantoran.
4. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, direncanakan pada akhir tahun ke-lima anggaran bidang pendidikan sudah mendekati 20 % dari total anggaran. Bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk penambahan tenaga medis, pendirian rumah sakit, puskesmas, maupun puskesmas pembantu, demikian pula anggaran kesehatan untuk keluarga miskin akan terus ditingkatkan. Arah kebijakan diprioritaskan untuk tercapainya target kenaikan IPM sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJP.
5. Pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud apabila ada persamaan persepsi diantara seluruh pemangku kepentingan, sehingga harus ditumbuhkan rasa memiliki dan kebersamaan.
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat KBB melalui pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup. Pengalihan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku.
7. Pemilihan lokasi untuk kawasan industri harus dilakukan secara cermat, terutama untuk industri yang polutif dengan pemakaian air tinggi. Industri polutif bisa diterima asal penggunaan airnya dilakukan secara daur ulang, sehingga tidak ada pembuangan air limbah keluar pabrik dan pengambilan air bawah tanah bisa dibatasi.

## 5.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Bagian Pembiayaan dalam struktur APBD merupakan bagian yang sama pentingnya dengan bagian pendapatan dan belanja. Apabila terjadi surplus anggaran maka alokasi

penggunaannya dilaksanakan melalui pos-pos yang ada dalam pembiayaan, demikian pula apabila terjadi defisit yang tidak bisa lagi ditutup dengan menaikkan pos-pos yang ada dalam struktur pendapatan, maka diupayakan ditutup melalui pos yang terdapat dalam bagian pembiayaan.

Arah kebijakan pembiayaan dalam selama lima (5) tahun pertama pelaksanaan RPJP Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut

### 5.5.1 Penerimaan pembiayaan

#### 5.5.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu biasanya terjadi karena :

- a. Adanya program yang tidak terlaksana;
- b. Adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja, sehingga pengeluaran kas lebih kecil dari yang dianggarkan;
- c. Pelaksanaan tender dimenangkan oleh rekanan dengan penawaran yang lebih rendah dari anggaran proyek;
- d. Penerimaan pendapatan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

SiLPA yang terlampau besar menunjukkan buruknya perencanaan dan pelaksanaan program, diproyeksikan bahwa mulai anggaran tahun 2009 besarnya SiLPA tidak melebihi 10 % dari total anggaran. Caranya dengan lebih memperhatikan kualitas program, sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mengendap dalam bentuk SiLPA.

#### 5.5.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Dana cadangan yang telah dibentuk dicairkan sesuai dengan peruntukannya.

#### 5.5.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang tidak dimanfaatkan dan kurang strategis sebaiknya dijual atau dimanfaatkan melalui kerjasama operasi (*Building Operation Transfer/BOT*)

#### 5.5.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

Kekurangan dana pada awal tahun perencanaan dapat ditutup dengan melakukan pinjaman daerah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dari pemerintah daerah lainnya, atau dari lembaga keuangan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Kemampuan melakukan pinjaman daerah dapat dihitung dengan menerapkan rumus *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

$$DSCR = Y / C$$

Dimana :

Y	=	P + M – OM
Y	=	Pendapatan Daerah
P	=	Pendapatan Asli Daerah
M	=	Bagi Hasil Pajak dan non pajak
OM	=	Belanja Langsung
C	=	Kewajiban Daerah sebagai akibat adanya pinjaman daerah dan kewajiban lainnya.

Jumlah pendapatan dalam tahun 2008 berdasarkan APBD adalah :

P/PAD	=	Rp 29.656.248.550
M1/Bagi Hasil	=	Rp 55.068.337.056
M2/Lain-lain pendapatan daerah yang sah (pembagian pajak dari provinsi)	=	Rp 37.568.291.500
M3/Selisih DAU dengan Gaji pegawai	=	Rp 486.211.550.000 - Rp 403.747.014.875
	=	Rp 82.464.535.125,-
Jumlah M (M1 + M2 + M3)	=	Rp 55.068.337.056 + Rp 37.568.291.500 + Rp 82.464.535.125
	=	Rp 175.101.163.681
OM/Belanja langsung	=	Rp 195.294.400.800
Maka Y	=	(Rp 29.656.248.550 + Rp 175.101.163.681) - Rp 195.294.400.800
	=	Rp 9.463.011.431

$$DSCR = \frac{Rp\ 9.463.011.431}{Rp\ 5.500.000.000} = 1,72$$

Sesuai dengan ketentuan, apabila DSCR < dari 2,5 daerah tidak layak melakukan pinjaman. Namun karena pinjaman ini diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan kantor pemerintahan maka mulai APBD tahun 2009 belanja tidak langsung berupa belanja hibah dan bantuan keuangan kepada masyarakat akan dikurangi dan melakukan efisiensi dalam belanja langsung terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

Sehingga komposisi komponen formula DSCR akan menjadi seperti berikut :

P/PAD	=	Rp 30.495.447.000
-------	---	-------------------



M1/Bagi Hasil	= Rp 60.520.000.000
M2/Lain-lain pendapatan daerah yang sah (pembagian pajak dari provinsi)	= Rp 40.000.000.000
M3/Selisih DAU dengan Gaji Pegawai	= Rp 566.588.930.000 - Rp 470.573.000.000 = Rp 96.015.000.000
Jumlah M (M1 + M2 + M3)	= Rp 60.520.000.000 + Rp 40.000.000.000 + Rp 96.015.000.000 = Rp 196.535.000.000
OM/Belanja langsung (di luar yang dibiayai SILPA)	= Rp 200.000.000.000
Maka Y	= (Rp30.495.447.000 + Rp 196.535.000.000) - Rp 200.000.000.000 = Rp 27.030.447.000

Dengan asumsi pinjaman yang diperlukan sebesar Rp 50.000.000.000,- dengan jangka waktu 5 tahun bunga 10 % per tahun maka kewajiban pembayaran rata-rata per tahun sebesar Rp 5.500.000.000,- maka besarnya DSCR adalah :

$$\begin{aligned} \text{DSCR} &= \frac{\text{Rp 27.030.447.000}}{\text{Rp 5.500.500.000}} \\ &= 4,91 \end{aligned}$$

DSCR > 2,5 berarti Pemda KBB bisa melakukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.000.

## 5.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

### 5.5.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan disediakan untuk pemenuhan belanja yang diperhitungkan akan menjadi beban pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun-tahun yang akan datang. Pembentukan dana cadangan perlu dilakukan untuk menghindari beban yang terlampau berat pada saat suatu kegiatan yang memerlukan dana besar terjadi. Kegiatan yang perlu dibentuk dana cadangan adalah :

- a. Pembangunan kantor pemerintahan; dan
- b. Pelaksanaan Pilkada langsung pemilihan Bupati/Wk. Bupati pada tahun 2013.

Pembangunan kantor pemerintahan diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp 150 milyar, dari dana sebesar itu diperkirakan akan dibantu oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebesar Rp 100 milyar, sehingga sisa yang menjadi beban Pemerintah Daerah KBB adalah sebesar Rp 50 milyar.

Pemilihan Bupati/Wk.Bupati pada tahun 2013 diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp 20 milyar berarti mulai tahun 2010 harus disisihkan dana cadangan sebesar Rp 5 milyar per tahun.

#### 5.5.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Akan dilakukan jika sudah ada hasil penelitian tentang potensi daerah yang bisa dikembangkan baik dalam bidang agribisnis maupun wisata alam, dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

#### 5.5.2.3 Pembayaran Pokok Utang

Dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman, dengan catatan tidak boleh lebih dari Rp 10 milyar per tahun.

#### 5.5.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Pada tahap awal RPJM pemberian pinjaman kepada daerah lain tidak mungkin dapat dilakukan.

#### 5.5.2.5 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA)

### 5.5.3 Pembiayaan Netto

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 161 ayat (2) bahwa pembiayaan netto harus dapat menutupi defisit.

## 5.6 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Sumber pendanaan pembangunan terdiri dari kerangka penerimaan dan kerangka pengeluaran, hasilnya menunjukkan bahwa pada Tahun 2009 sampai 2011, anggaran pembangunan mengalami surplus. Defisit mulai terjadi sejak tahun 2012, hal ini diakibatkan oleh adanya asumsi terhadap pembayaran pokok utang dan bunga, lihat Tabel 5.10 berikut.

Tabel 5.10. Kerangka Pendanaan KBB Tahun 2009-2014 (dalam ribuan).

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A	KERANGKA PENERIMAAN						
A.1	Pajak Daerah	21.845.547	23.374.737	25.010.969	26.761.738	28.635.059	30.639.513
A.2	Retribusi Daerah	<b>9.302.567</b>	<b>9.961.697</b>	<b>10.667.819</b>	<b>11.424.289</b>	<b>12.234.744</b>	<b>13.103.056</b>
A.3	Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	300.000	321.000	343.470	367.513	393.239	420.766
A.4	Lain-Lain Pad Yang Sah	4.060.000	4.344.200	4.648.294	4.973.675	5.321.832	5.694.361
	SUB TOTAL PAD (A.1+A.2+A.3+A.4)	<b>35.508.114</b>	<b>38.001.634</b>	<b>40.670.552</b>	<b>43.527.215</b>	<b>46.584.874</b>	<b>49.857.676</b>
A.5	Dana Bagi Hasil	60.514.547	64.055.562	67.844.447	71.898.555	76.236.451	80.877.999
A.6	Dana Perimbangan	662.810.684	709.207.433	758.851.953	811.971.590	868.809.601	929.626.273
A.7	Penerimaan Pembiayaan	81.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	97.100.000	100.397.000
	Total Penerimaan (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6+A.7)	839.833.345	891.264.629	947.366.952	1.007.397.360	1.088.730.926	1.160.758.943
B	KERANGKA PENGELUARAN						
B.1	Belanja Tidak Langsung	548.310.500	560.641.835	603.459.766	648.470.450	693.512.382	731.147.247
B.2	Belanja Langsung	291.293.644	311.684.198	333.502.094	356.847.240	381.826.547	408.554.406
B.3	Pengeluaran Pembiayaan	-	5.000.000	10.000.000	25.000.000	35.000.000	35.350.000
	TOTAL PENGELUARAN (B.1+B.2+B.3)	839.604.144	877.326.033	946.961.860	1.030.317.690	1.110.338.929	1.175.051.653
	SURPLUS / (DEFISIT)	<b>229.201</b>	<b>13.938.595</b>	<b>405.092</b>	<b>(22.920)</b>	<b>(21.608)</b>	<b>(14.292)</b>

Sumber : Hasil Analisis DPPKAD Kab. Bandung Barat, 2009

## 5.7 Anggaran Program

Dalam melaksanakan sebuah program tidak akan lepas dari adanya kebutuhan anggaran, sehingga dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat telah dirancang modeling untuk menentukan besarnya anggaran yang disesuaikan dengan nilai bobot seperti dibahas pada Bab 4.8. Kepentingan dan Kemendesakan. Hasil akhir penganggaran untuk setiap program lihat Tabel 5.11, Tabel 5.12, Tabel 5.13, Tabel 5.14, dan Tabel 5.15.

Penentuan pemodelan anggaran program berdasarkan pembobotan, berkonsekuensi terhadap kurangnya anggaran (defisit/selisih antara kebutuhan anggaran

dan ketersediaan anggaran) pada tahun-tahun awal dan kelebihan anggaran (surplus) ketika memasuki tahun-tahun selanjutnya. Sehingga untuk menyesuaikan dengan kenyataan maka diperlukan penggeseran waktu pelaksanaannya atau harus dicari upaya untuk memenuhi selisih anggaran.

Tabel 5.11. Alokasi anggaran untuk setiap program pada strategi pertama 'Penataan SDM aparatur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

PROGRAM	TAHUN						BOBOT
	1	2	3	4	5	6	
Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan	0,00	0,00	1,65	1,65	1,65	1,65	6,59
Peningkatan kapasitas aparat untuk mendukung bidang pertanian (agribisnis, agroindustri), serta wisata alam.	0,00	0,00	1,65	1,65	1,65	1,65	6,59
Peningkatan Kapasitas aparat dalam pengelolaan anggaran secara transparan	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	1,65
Pengawasan dan penegakan hukum atas praktek-praktek korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya dari penyelenggaraan pemerintah yang bersih	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	1,65
Pemekaran Wilayah	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	4,95
Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan pemerintah yg mendukung pengembangan pertanian (agribisnis dan agroindustri) serta pengembangan dan pengelolaan wisata alam	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
Peningkatan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pertanian (agrobisnis dan agroindustri)	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
Peningkatan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pengelolaan wisata alam	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
Sosialisasi untuk pengembangan minat, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pada pertanian (agrobisnis dan agroindustri) dan pengelolaan wisata alam	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
Peningkatan keswadayaan masyarakat	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
Pengadaan beasiswa pendidikan	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
Peningkatan sarpras kesehatan khususnya di wilayah perdesaan	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19
Peningkatan sarpras pendidikan dari tingkat SLTP/wajar dikedas di kecamatan (& akses transportasinya)	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99
Pembangunan perpustakaan desa	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00	4,95
Peningkatan sarpras keagamaan	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
Peningkatan sarpras pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,55
Pembangunan sarana prasarana pemerintahan	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	4,40
Pengadaan utilitas (telepon, listrik, air bersih)	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
Infrastruktur skala kabupaten	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
Penyediaan jaminan sosial bagi golongan pekerja	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55
Penyediaan jaminan ekonomi bagi golongan pekerja	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55
<b>KEBUTUHAN ANGGARAN DARI MODEL</b>	<b>34,62</b>	<b>34,62</b>	<b>8,24</b>	<b>14,01</b>	<b>4,40</b>	<b>4,12</b>	

<b>RIIL ANGGARAN</b>	<b>14,39</b>	<b>14,34</b>	<b>15,77</b>	<b>17,35</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>	
<b>SELISIH</b>	<b>-20,23</b>	<b>-20,28</b>	<b>7,53</b>	<b>3,34</b>	<b>14,68</b>	<b>14,96</b>	

Sumber: Hasil perhitungan P4W-IPB (2008)

Tabel 5.12. Menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah agroindustri

PROGRAM	TAHUN						BOBOT
	1	2	3	4	5	6	
Pelibatan masyarakat u/memahami, mengetahui, melaksanakan agribisnis & agroindustri	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	3,06
Penguatan Kelembagaan tani dengan mengatur pola tanam	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
Peningkatan kapasitas sdm petani dengan penyebar luasan penerapan teknologi	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	6,12
Penerapan mitigasi bencana	0,00	0,00	1,34	1,34	1,34	1,34	5,36
Pendampingan untuk menjaga berjalannya program	0,00	0,00	4,02	4,02	4,02	4,02	16,07
Fasilitasi penempatan PPL/Desa	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
Peningkatan kemampuan & sarana penyuluhan.	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
Penyediaan alat-alat pertanian, pupuk pertanian.	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00	2,30
Peningkatan budidaya pasca panen	0,00	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	3,06
Penerapan teknologi tepat guna	0,00	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	3,06
Perbaikan & perluasan infrastruktur pendukung pertanian.	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	7,14
Pengembangan industri kecil dan menengah pengolahan hasil pertanian	0,00	0,00	0,00	2,68	2,68	0,00	5,36
Pembangunan fasilitasi pengembangan infrastruktur untuk pengembangan agroindustri skala besar	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	2,04
Pembentukan koperasi	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
Pengadaan fasilitasi pemodal	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	3,83
Pengembangan Usaha/Jasa untuk peningkatan nilai tambah petani	0,00	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00	6,89
Pengembangan Pemasaran	0,00	0,00	2,30	2,30	2,30	0,00	6,89
Pencegahan konversi lahan	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	7,14
Pencetakan lahan pertanian baru	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,77
Pemanfaatan lahan tidur untuk komoditas produktif.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1,02
Pengenalan potensi daerah melalui website	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
<b>KEBUTUHAN ANGGARAN DARI MODEL</b>	<b>15,35</b>	<b>17,90</b>	<b>18,92</b>	<b>20,37</b>	<b>18,32</b>	<b>9,14</b>	
<b>RIIL ANGGARAN</b>	<b>14,39</b>	<b>14,34</b>	<b>15,77</b>	<b>17,35</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>	
<b>SELISIH</b>	<b>-0,96</b>	<b>-3,56</b>	<b>-3,15</b>	<b>-3,02</b>	<b>0,76</b>	<b>9,94</b>	

Sumber: Hasil perhitungan P4W-IPB (2008)

Tabel 5.13. Menjadikan Bandung Barat sebagai daerah tujuan wisata terdepan Bandung yang berwawasan lingkungan

di Tatar

PROGRAM	TAHUN						BOBOT
	1	2	3	4	5	6	
Peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat di obyek wisata	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	7,87
Peningkatan kapasitas kualitas&kuantitas SDM aparat dalam bidang kepariwisataan	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
Pembangunan dan pemeliharaan sapras untuk pengelolaan obyek2 wisata kepariwisataan	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
Membangun atau memperbaiki sarana & prasarana (seperti jalan, listrik, jaringan komunikasi) pendukung wisata alam	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
Pengembangan program penghijauan	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	9,45
Pencarian dukungan dari pemerintah	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
Pengembangan kerjasama dengan swasta	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
Pengembangan kerjasama dengan Perhutani	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
Pengaturan pengelolaan wisata	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
Penerapan keterpaduan SKPD	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	4,72
Penerapan legalitas kepariwisataan	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
Peningkatan dukungan politik dalam pengembangan wisata alam	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
Pengkajian	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
Promosi	0,00	0,00	3,54	3,54	0,00	0,00	7,09
<b>KEBUTUHAN ANGGARAN DARI MODEL</b>	<b>40,42</b>	<b>40,42</b>	<b>8,53</b>	<b>5,91</b>	<b>2,36</b>	<b>2,36</b>	
<b>RIIL ANGGARAN</b>	<b>14,39</b>	<b>14,34</b>	<b>15,77</b>	<b>17,35</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>	
<b>SELISIH</b>	<b>-26,03</b>	<b>-26,08</b>	<b>7,24</b>	<b>11,44</b>	<b>16,72</b>	<b>16,72</b>	

Sumber: Hasil perhitungan P4W-IPB (2008)

Tabel 5.14. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kualitas usaha kecil menengah dan penyadaran berkoperasi

PROGRAM	TAHUN						BOBOT
	1	2	3	4	5	6	
Sosialisasi peraturan perundangan dan penegakan hukum	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Penyediaan layanan koperasi syariah	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
Pembuatan per.inan satu atap	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33
Peningkatan akses permodalan	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	10,67
Pembuatan baseline UKM-koperasi	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Peningkatan kualitas SDM	1,78	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	5,33
Peningkatan kemandirian desa dlm pengembangan UKM & koperasi	10,67	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
Pembentukan forum koordinasi UKM-koperasi	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67
Pembentukan sentra produk unggulan UKM	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	8,00
Peningkatan akses pasar	2,67	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	8,00
Peningkatan akses transportasi	10,67	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
<b>KEBUTUHAN ANGGARAN DARI MODEL</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>24,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RIIL ANGGARAN</b>	<b>14,39</b>	<b>14,34</b>	<b>15,77</b>	<b>17,35</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>	
<b>SELISIH</b>	<b>-21,61</b>	<b>-21,66</b>	<b>-8,23</b>	<b>13,35</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>	

Sumber: Hasil perhitungan P4W-IPB (2008)



Tabel 5.15. Akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa

PROGRAM	TAHUN						BOBOT
	1	2	3	4	5	6	
Peningkatan pemahaman otonomi desa bagi aparat desa dan masyarakat	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71
Peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan masyarakat	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
Pelaksanaan program oleh pemerintah harus mengacu pada penguatan otonomi desa	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	6,20
Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung desa dikelola oleh lembaga masyarakat desa	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00	0,00	16,28
Peningkatan dan pelestarian budaya gotong royong	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	4,65
Pejabat desa dan pemerintah (RT, RW, Kepala desa, dan Camat) memberikan contoh nyata oleh dalam bergotong royong	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	4,65
Peningkatan Perekonomian Desa	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
Pemberian akses permodalan pertanian	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	7,75
Pembuatan perdes pembangunan desa	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
<b>KEBUTUHAN ANGGARAN DARI MODEL</b>	<b>31,52</b>	<b>39,28</b>	<b>13,31</b>	<b>10,72</b>	<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	
<b>RIIL ANGGARAN</b>	<b>14,39</b>	<b>14,34</b>	<b>15,77</b>	<b>17,35</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>	
<b>SELISIH</b>	<b>-17,13</b>	<b>-24,94</b>	<b>2,46</b>	<b>6,63</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	

Sumber: Hasil perhitungan P4W-IPB (2008)